

ABSTRAK

Desentralisasi fiskal Indonesia yang telah berlangsung sejak 2001 belum sepenuhnya mewujudkan kemandirian fiskal daerah yang merata, tercermin dari fakta bahwa lebih dari 60% kabupaten/kota masih berkapasitas fiskal rendah menurut PMK No. 65 Tahun 2024, sementara transfer DAU, DAK, dan DBH terus meningkat namun belum efektif mengurangi ketergantungan fiskal. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh ketiga instrumen transfer tersebut terhadap kemandirian fiskal daerah, menguji moderasi kelembagaan asimetris, serta memetakan kapasitas fiskal dari sisi penerimaan dan belanja.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi data panel *Two-Way Fixed effects* (TWFE) pada 508 kabupaten/kota di Indonesia selama periode 2018–2024 dengan *clustered robust standard error*. Variabel dependen utama adalah rasio PAD terhadap PDRB ADHK sebagai proksi *tax effort*. Variabel independen utama terdiri dari rasio logaritma natural DAU, DAK, dan DBH terhadap belanja daerah, serta interaksi DAU dengan *dummy* Otonomi Khusus (Aceh dan Papua) dan *dummy* Keistimewaan (DIY). Variabel kontrol mencakup PDRB per kapita, ukuran populasi, dan usia daerah. Analisis dilengkapi dengan *Expenditure Decentralization Index* (ED2) sebagai indikator kemandirian fiskal dari sisi belanja, simulasi kebutuhan peningkatan PAD, serta pemetaan kuadran KF–ED2.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU berhubungan negatif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah yang mencerminkan *flypaper effect*. DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian fiskal karena sifatnya yang *earmarked* sehingga tidak berdampak langsung pada PAD. DBH juga berhubungan negatif dan signifikan yang konsisten dengan fenomena *resource curse* fiskal. Interaksi DAU dengan status Otsus dan Keistimewaan berhubungan positif dan signifikan, menunjukkan bahwa desentralisasi asimetris mampu mengurangi dampak negatif transfer terhadap kemandirian fiskal. PDRB per kapita dan jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan, sementara usia daerah berpengaruh positif dan signifikan yang mencerminkan kematangan kelembagaan. Simulasi kebijakan menunjukkan bahwa 99,69% daerah masih membutuhkan peningkatan PAD dalam kategori berat untuk mencapai kemandirian minimum, sementara lebih dari 91% daerah memiliki otonomi belanja yang sangat rendah.

Kata Kunci: Kemandirian Fiskal, Desentralisasi Fiskal, Transfer Fiskal Antarpemerintah, *Tax effort*, Desentralisasi Belanja

Klasifikasi JEL: H71, H77, H72, C23, R51